

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SELASA
17 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



PJ GUBERNUR DAN KAJATI KALTIM SINERGI UNTUK IKN

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik (kiri) saat menyambangi Kajati Kaltim Hari Setiyono (kiri).
HO/Kejati Kaltim)

PJ GUBERNUR DAN KAJATI KALTIM SINERGI UNTUK IKN

SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik membangun kebersamaan dan sinergi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Hari Setiyono dalam memajukan pembangunan dan pelayanan publik di daerah untuk persiapan menuju Ibu Kota Negara (IKN).

"Dalam pertemuan tersebut, Kajati siap membantu memberikan pendampingan pengamanan untuk seluruh program-program pembangunan di daerah," ujar Akmal saat silaturahmi di Kantor Kejati Kaltim Samarinda, Senin.

Akmal mengapresiasi komitmen kejaksaan dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum secara persuasif.

"Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tentunya juga menegakkan hukum secara persuasif," ucap Akmal.

Sementara itu Kajati Kaltim Hari Setiyono berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan IKN.

"Kami punya intelijen, kami punya tim Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk pengamanan pembangunan

strategis baik nasional maupun di daerah," tutur Kajati Hari.

Hari menyatakan, tim Datun melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan persoalan. Dari sisi pengamanan ganti rugi lahan, misalnya, tentu jangan sampai menjadi persoalan hukum tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia menuturkan, kejaksaan memiliki berbagai fungsi yang dapat mendukung pembangunan di daerah, seperti Intelijen Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pengamanan pembangunan strategis nasional maupun daerah, serta penuntutan perkara pidana.

"Kami bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas daerah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, ujar Hari.

Ia bersyukur sampai dengan saat ini Kaltim luar biasa kondusif dan ini berkat dukungan penjabat gubernur.

"Oleh karena itu, ucapnya, kami bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga agar pesta demokrasi berjalan dengan baik," tutup Hari.

Pewarta : Arumanto
Editor : Guido Merung



Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin

UDIN NILAI ERA ISRAN-HADI BANYAK PERSOALAN YANG BELUM TUNTAS

SAMARINDA - Masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim telah berakhir pada tanggal 30 September 2023 lalu. Kepemimpinan mereka kemudian dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yakni Akmal Malik.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim M. Udin, selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, sejumlah permasalahan dianggapnya belum terselesaikan, seperti yang terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

"Beliau juga menyadari masih banyak masalah selama lima tahun menjabat; tentu hal ini perlu menjadi koreksi," ujar Politisi Golkar ini.

Misalnya, menurutnya, salah satu aduan masyarakat di Kabu-

paten Berau, di mana seseorang harus menempuh jarak 7 km hanya untuk bersekolah, padahal ada sekolah yang jaraknya hanya 350 meter dari kediamannya.

Dari segi ketenagakerjaan, katanya, penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

Ia berharap Pemprov Kaltim membuat pelatihan-pelatihan dan wadah untuk mengasah keterampilan bagi anak-anak muda yang ingin bekerja. "Kalau kita tidak berbenah dari sekarang, maka kita akan ketinggalan," ucap Udin.

Belum lagi berbicara mengenai infrastruktur seperti jalan di Kaltim yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Menurutnya, banyak ruas jalan di Kaltim yang mengalami kerusakan

seperti jalan Samarinda – Kutai Barat, Samarinda – Bontang, Berau – Tanjung Redeb, Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun. Ia menduga bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh banyaknya aktivitas kendaraan operasional perusahaan sawit dan batu bara yang menggunakan jalan umum.

"Salah satu penyebabnya tambang ilegal karena setiap koridor tampak melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita, termasuk aparat kita juga," tegasnya.

Dengan beberapa hal yang dianggapnya belum terselesaikan tersebut, ia berharap Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dapat mengatasi permasalahan yang masih terbuka semasa kepemimpinan Isran-Hadi. (Eky/adv/dprdkaltim)



Dari Kanan: Rachmawati Bersama Anak-Anak Didiknya di TBM Iqro

TBM IQRO DENGAN SEGUDANG PRESTASI

SAMARINDA - Rachmawati dan Taman Baca Masyarakat (TBM) Iqro yang dimilikinya telah mengumpulkan sejumlah prestasi mulai dari tingkat Pemerintah Kota Samarinda hingga tingkat Nasional.

Dalam catatan yang terdapat di situs web TBM Iqro yang berdiri sejak tahun 2015, prestasi-prestasi telah diraih sejak tahun 2017. Prestasi tersebut melibatkan Rachmawati secara individu, Lembaga TBM Iqro, dan bahkan anak-anak didik TBM Iqro.

Rachmawati menyatakan kebahagiaannya atas semua prestasi ini, baik yang diraih secara individu maupun oleh Lembaga TBM Iqro dan anak-anak didiknya. Hal ini tentu tidak lepas dari usaha Rachmawati dalam mempromosikan budaya literasi, terutama di kalangan anak-anak sekolah di sekitar TBM.

"Kegiatan di TBM Iqro rutin

diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu, dengan partisipasi sekitar limapuluh anak didik. Pada hari Minggu, biasanya menjadi waktu yang paling ramai. Kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan mencakup berbagai aktivitas seperti membaca buku, membaca puisi, mendongeng, dan menari," jelas Rachmawati.

Rachmawati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap semua TBM yang ada di Kalimantan Timur.

"Kami berharap agar Dinas Pendidikan dapat memberikan bimbingan dan perhatian yang lebih, terutama dari pemerintah provinsi, dan semua ini dapat didukung oleh Dinas Provinsi," katanya.

Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Rachmawati termasuk Juara 1 dalam pembuatan alat peraga pendidikan tingkat Kota Sa-

marinda pada tahun 2017, Juara 3 dalam kompetisi vlogger dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara pada tahun 2018, Juara 1 sebagai pengelola TBM tingkat Kota dan Kalimantan Timur pada tahun 2021, dan yang terbaru adalah menerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka pada tahun 2023, selain masih banyak prestasi lainnya.

Sementara itu, prestasi yang diraih oleh Lembaga TBM Iqro termasuk menjadi TBM yang menciptakan buku cerita bergambar terbaik tingkat Kota Samarinda pada tahun 2018.

TBM Iqro terletak di Jl. Juyo Mulyo Gg. Atthoriq, RT. 37/RW. No. 61, Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Tempat ini berada di rumah pribadi Rachmawati yang juga ditempati bersama keluarganya. (Han)

Pewartu: Hanafi

Editor: Agus Susanto



PENGUNGKAPAN KASUS NARKOBA DI SAMARINDA, DUA PELAKU DITANGKAP DI LOA JANAN

SAMARINDA - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap dua pelaku di Jl. Cipto Mangunkusomo, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Kasi Humas Polresta Samarinda Iptu M Rizal mengungkapkan, penangkapan dimulai pada Sabtu, 14 Oktober 2023, dari laporan masyarakat.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Jl. Cipto Mangunkusomo, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Sekitar pukul 15.30 WITA, petugas mencurigai seorang pria yang berada di pinggir jalan. Kemudian, dilakukan penggeledahan terhadap pria berinisial SG (34 tahun).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti satu poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,68 gram bruto yang ditemukan digengaman tangan sebelah kanan SG.

Selain itu, ditemukan juga satu buah sendok penakar, 1 unit HP Android, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 yang diduga hasil penjualan narkoba, ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan pelaku.

Selanjutnya, pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mako Polresta Samarinda untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsidi Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (MK)



REMAJA MA TERTANGKAP LAGI, DARI PENCURIAN KOTAK AMAL HINGGA SEPEDA MOTOR

SAMARINDA - Seorang remaja berinisial MA harus berhadapan dengan aparat kepolisian setelah serangkaian aksinya mencuri di lingkungan Masjid. Kejadian terbaru, Rabu, 11 Oktober 2023, MA mencuri sepeda motor, di salah satu Masjid di Jln. Gelatik, Samarinda.

MA, yang tinggal di Jalan Dhamanuri, merupakan seorang remaja yang telah beberapa kali diamankan pihak kepolisian karena sering terlibat dalam tindakan pencurian di wilayah sekitar rumahnya.

Aksi sebelumnya, MA mengambil isi kotak amal dari beberapa Masjid di wilayah Samarinda Utara dan Sungai Pinang.

Kali ini, MA kembali beraksi dengan mencuri sepeda motor milik M. Padriani, marbot Masjid yang tengah melaksanakan ibadah Salat Dzuhur.

MA melihat bahwa kunci sepeda motor masih menempel di kendaraan tersebut, sehingga dia dengan nekat membawanya kabur.

Kompol Ahmad Abdullah, Kapolsek Sungai Pinang mengungkapkan, hasil penyelidikan tim Opsnal Reskrim Polsek Sungai Pinang berhasil me-

nemukan sepeda motor yang dicuri di daerah Jl. Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu, hanya 2 hari setelah pencurian terjadi.

Tak lama setelah itu, tersangka MA berhasil diamankan di sekitar Jl. Gelatik, Kecamatan Sungai Pinang.

MA kini dihadapkan pada ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun karena melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Meskipun begitu, karena MA masih berstatus sebagai remaja di bawah umur, maka sistem peradilan pidana anak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 akan diterapkan dalam penanganan kasus ini.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan turut serta menjaga kendaraannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan kunci ganda dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Kesadaran bersama dalam menjaga keamanan adalah langkah penting dalam mencegah tindakan kriminal," pungkas Ahmad Abdullah, Kapolsek Sungai Pinang. (rls)

Editor: Agus Susanto



OK!
TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp 698.000,-

30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast 2 pax	FREE Laundry Up To 2 pcs	FREE Kopi Inspirasi Buy 3, Pay 2
FREE Afternoon Tea	FREE Mini Mantou 5 pcs	

➔ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



RATUSAN PEGAWAI PEMKAB PPU JALANI TES URINE



SYAHRUDIN APRESIASI GERAKAN
PANGAN MURAH PEMKAB PPU



Pj Bupati PPU saat meninjau langsung pelaksanaan tes urine. (Robbi/MediaKaltimGroup)

RATUSAN PEGAWAI PEMKAB PPU JALANI TES URINE

PPU - Ratusan pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Setkab Penajam Paser Utara (PPU) jalani tes urine. Kegiatan itu digelar usai pelaksanaan apel pagi, Senin, (16/10/2023).

Tes urine ini digelar sesuai himbauan langsung Pj Bupati PPU, Makmur Marbun melalui Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU. Dalam pelaksanaannya, ia juga langsung memantau jalannya tes urine yang digelar di Aula lantai I kantor bupati PPU ini.

“Melalui kegiatan ini, dalam rangka memastikan bahwa tidak ada pegawai di lingkungan Pemkab PPU yang terlibat narkoba,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada pegawai yang menggunakan narkoba. Hal itu rencananya juga akan dilakukan sebulan sekali atau setiap dua bulan sekali.

“Saya juga rencana nanti akan melakukan tes urin berkala apakah setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali,” ungkapnya.

Selain itu, Makmur tidak ingin ada perangkatnya yang terjerat dengan penyalahgunaan narkoba. Jika ada yang didapatkan maka ia akan langsung menyerahkan untuk diproses hukum.

Seperti diketahui, sebelumnya juga ada balai rehabilitasi untuk para korban narkoba, hasil kerjasama Pemkab PPU dan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU. Balai tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU dan Rumah Sakit Pratama Sepaku.

“Korban penyalahgunaan narkoba, bisa direhabilitasi medis dan sosial di tempat tersebut. Juga dimaksudkan sebagai pencegahan bertambahnya jumlah pengguna narkoba,” tutup Makmur. (ADV/SBK)



Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor (kiri), saat mendampingi Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, saat meninjau gelaran pasar murah di Babulu, pada hari Senin, 16 Oktober 2023. (Robbi/Media Kaltim Group)

SYAHRUDIN APRESIASI GERAKAN PANGAN MURAH PEMKAB PPU

PPU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemkab PPU pada Senin, 16 Oktober 2023.

Langkah ini dianggapnya sebagai upaya positif mendukung produksi lokal dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah tersebut.

Syahrudin mengakui bahwa penyelenggaraan pasar murah adalah langkah yang penting untuk mengantisipasi potensi inflasi. Ia menekankan perlunya upaya keras dari pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat inflasi secepat mungkin, dan pasar murah menjadi salah satu tindakan konkret dalam meredam inflasi.

“Gerakan pasar murah ini adalah langkah antisipatif kami di PPU untuk mencegah terjadinya inflasi akibat pasokan dari luar,” katanya.

Pasar murah ini diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten PPU. Se-

lain mempromosikan kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi, yang tetap menjadi perhatian utama pemerintah pusat.

Menurut Syahrudin, pemerintah daerah harus bergerak nyata di lapangan. Menurutnya, penyelenggaraan pasar murah seperti ini akan membantu menstabilkan harga-harga di pasar dan mengurangi tingkat inflasi.

“Dengan Gerakan Pasar Murah ini, kami berharap dapat menciptakan stabilitas harga di PPU,” ujarnya.

Selain itu, Syahrudin juga mendorong seluruh elemen masyarakat di PPU untuk mendukung dan mengonsumsi produk beras lokal. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung produksi lokal.

“Langkah proaktif seperti operasi pasar atau bursa pangan murah menjadi salah satu solusi cepat dalam mengatasi lonjakan harga,” tambah Syahrudin. (SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat pelepasan CPP di Kecamatan Babulu, Senin (16/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PERINGATI HARI PANGAN SEDUNIA, PEMKAB PPU SALURKAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHAP II DI BABULU

PPU - Peringati Hari Pangan Sedunia ke-43 yang digelar secara serentak dalam Gerakan Pangan Murah di 441 titik di tanah air. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu daerah yang dipilih oleh Pemprov Kaltim dalam menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), Senin (16/10/2023).

Dalam kegiatan itu, Pemkab PPU sekaligus dilaksanakannya Lanching Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Pusat (CPP) Tahap II. Yakni dengan menyalurkan beras dalam periode Oktober 2023 di wilayah Kecamatan Babulu.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan kegiatan ini yang pertama dilakukan di Kabupaten PPU. Adapun beras CPP yang didistribusikan ini diperuntukkan bagi 2.889 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Hari ini kita bersama seluruh unsur pemerintah Provinsi, Pemkab PPU dan Forkopimda dan lintas sektor terkait melaunching distribusi cadangan pangan pemerintah pusat tahap II. Yang hari ini masing-masing memperoleh 10 kilogram beras selama tiga bulan serta jumlah yang disalurkan di Kecamatan Babulu sebanyak 86,7 ton," ungkapnya.

Makmur menerangkan dasar kegiatan ini dilakukan ialah guna menjaga stabilitas pangan dan inflasi nasional. Termasuk dilakukannya gerakan pangan murah dengan sejumlah komoditas pangan yang ada kepada masyarakat.

"Kegiatan pangan murah ini adalah suatu langkah dalam upaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, dengan menggandeng semua pihak terkait tanpa terkecuali. Karena ini adalah kunci dalam menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan yang berdampak dengan pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan arahan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Oleh karena, pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan baik bagi masyarakat. Khususnya yang berstatus miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.

"Adanya Gerakan Pangan Murah ini ialah untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, dibawah harga pasar serta menjaga ketersediaan bahan pangan," tutupnya. (ADV/SBK)



PEMKAB KUKAR GELAR GPM 2023 SELAMA 2 HARI, SIAPKAN 11 MACAM BAPOKTING



**Pemkab Kukar Siapkan 6 Unit Bus
Sekolah di APBD-P Kukar 2023**



Suasana Gerakan Pangan Murah di Halaman Parkir Kantor Bupati Kukar. (Rafi'i/Media Kaltim)

PEMKAB KUKAR GELAR GPM 2023 SELAMA 2 HARI, SIAPKAN 11 MACAM BAPOKTING

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Parkir Kantor Bupati Kukar, dengan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar sebagai leading sector-nya. Dilaksanakan selama dua hari, sejak tanggal 16-17 Oktober 2023.

Sebanyak 44 tenant yang menggelar berbagai bahan pokok penting (bapokting) dengan harga murah untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya. Bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, ditingkat produsen dan konsumen. Agar daya beli pangan masyarakat dapat meningkat. Disamping untuk menjaga tingkat inflasi di Kukar.

"Tahun ini lebih lengkap dan lebih banyak stok bapokting yang disiapkan untuk masyarakat Tenggarong dan sekitarnya," ungkap Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, Senin (16/10/2023).

Dilanjutkan Sutikno, berdasarkan neraca pangan Kukar hingga pekan kedua Oktober 2023, dari 11 Bapokting yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni beras, jagung,

bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan keriting, cabai rawit, daging sapi,

daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng dapat dikatakan cukup.

Untuk agenda GPM 2023, produk yang dijual disuplai langsung oleh beberapa stakeholder. Diantaranya Badan Urusan Logistik (Bulog), PT RNI, Kelompok Wani Tani (KWT), BUMDes beberapa desa di Kukar, UMKM pangan dan hasil bumi dari petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Termasuk beberapa toko retail seperti Alfamidi dan Eramart.

Namun, dijelaskan lebih lanjut, GPM 2023 bukan menjadi satu-satunya upaya Pemkab Kukar untuk menekan angka inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemkab Kukar pun sepanjang 2023 ini melakukan Operasi Pasar Murah di 300 titik yang tersebar di 20 kecamatan. Secara bergantian dan menggandeng Bulog.

"Barang yang disajikan diutamakan komoditas sembako asli lokal," tutup Sutikno. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Wabup Kukar, Rendi Solihin. (Istimewa)

Pemkab Kukar Siapkan 6 Unit Bus Sekolah di APBD-P Kukar 2023

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sedang mempersiapkan pemenuhan kebutuhan bus sekolah di Kukar, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar. Pengadaan dirasa sangat perlu, mengingat lokasi geografis Kukar yang unik dan luas.

Disamping memang Pemkab Kukar sedang fokus dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Salah satunya angkutan pelajar yang dirasa perlu untuk alat transportasi murid-murid di Kukar. Ini pun dalam rangka Pemkab Kukar, dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak sekolah.

“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisir rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin.

Kebutuhan ini pun kerap disampaikan oleh para orang tua murid kepada Pemkab Kukar. Bahkan langsung disampaikan kepada bupati maupun wabup Kukar. Hal ini pun langsung direalisasikan dalam bentuk uji coba, yang dilakukan di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong. Yakni penyerahan satu unit bus sekolah belum lama ini.

“Kita uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan (bus sekolah). Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” ucap Kadishub Kukar, Ahmad Junaidi, saat men-

dampingi Rendi.

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan pada APBD-P Kukar 2023 ini, total ada enam unit bus sekolah lagi yang akan disiapkan. Yang kemudian akan diserahkan kepada beberapa kecamatan yang dirasa perlu untuk dilakukan pengadaannya.

Sekedar diketahui, bus sekolah yang disiapkan oleh Pemkab Kukar memiliki spesifikasi 19 kursi dan 30 kursi. Dimana pengadaannya sudah dilakukan dan sedang dirakit di pabriknya. Diperkirakan akan diserahkan pada awal Desember 2023 mendatang. Kemudian akan resmi beroperasi pada awal 2024, untuk mengangkut pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Jadi di tahun ini sudah ada satu unit kami anggarkan di murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di perubahan kami adakan enam unit,” lanjutnya.

Pengelolaannya sendiri akan menggunakan sistem swakelola. Dibebankan pada pemerintah kelurahan ataupun desa penerima bantuan. Mulai dari biaya BBM-nya hingga perawatan tahunannya. Dan menasar para murid yang memang dirasa belum layak untuk menggunakan kendaraan sendiri ketika berangkat menuju sekolah.

“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan Insya Allah di tahun 2024 nanti mengikuti arahan kepala daerah akan kita adakan lagi. Kita akan atur konsep dan perkembangannya sesuai dengan keperluan masyarakat,” tutup Junaidi. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i



Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Istimewa)

HUT Bankaltimtara, DPRD Kukar Dorong Lakukan Inovasi Peningkatan Pelayanan ke Masyarakat

TENGGARONG - Banyak harapan disampaikan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, kepada Bankaltimtara, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, yang jatuh pada Senin (16/10/2023). Orang nomor satu di DPRD Kukar tersebut, menginginkan adanya peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Rasid mengatakan, Bankaltimtara sebagai perbankan plat merah dan didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kukar), bisa memberikan pelayanan prima. Salah satunya dengan memberikan jaminan perkreditan yang murah, cepat dan terjangkau.

“Harapannya dengan HUT Bankaltimtara, dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kutai Kartanegara,” ujar Rasid.

Tentunya manajemen Bankaltimtara harus terus bisa meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan ke masyarakat. Agar bisa bersaing secara sehat dengan bank swasta maupun bank plat merah lainnya.

Terbaru, bersama Pemkab Kukar merilis program dedikasi Kukar Idaman. Yakni Kredit Kukar Idaman (KKI) untuk petani, pembudidaya ikan dan nelayan. Setelah sebelumnya pada 2021 lalu merilis KKI yang menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini dianggap sukses untuk memenuhi permodalan masyarakat Kukar dengan pinjaman maksimal dan bunga 0 persen. Dengan harapan masyarakat tidak terjerat dengan pinjaman yang berasal dari rentenir. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Kades Tanjung Batu, Husniansyah. (Istimewa)

Desa Tanjung Batu Bangun Jalan Desa dan Halte Sungai

TENGGARONG - Desa Tanjung Batu, akan mendapatkan kucuran sejumlah anggaran, untuk pembangunan yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang tersebut. Salah satunya anggaran yang berasal aspirasi anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni pengerasan jalan Desa Tanjung Batu menuju desa sekitarnya.

Yakni berupa pengerasan jalan dari Desa Tanjung Batu menuju Desa Loa Ulung. Jalan yang disasar, dikatakan Kepala Desa (Kades) Tanjung Batu, Husniansyah, masih berupa jalan tanah. Diperkirakan sepanjang 2,7 kilometer (km) jalan yang akan dibangun pada anggaran APBD Perubahan Kukar 2023.

"Tahun ini diselesaikan, pengerasan dilakukan secara bertahap dan dikerjakan langsung oleh kecamatan," ujar Husniansyah.

Meski tidak menyampaikan secara detail jumlah anggaran yang dipakai, pengerjaan jalan ini pun akan ditopang oleh dana desa hingga dana Corporate Social Responsibility untuk proses pengukuran tanahnya.

Tak hanya itu, bantuan dari APBN pun mengucur ke Desa Tanjung Batu. Yakni pembangunan halte atau dermaga sungai yang berada di RT 2. Saat ini terus berproses, bahkan saat ini tengah terus melengkapi beberapa dokumen. Bahkan informasi yang diterimanya, sudah mendapatkan persetujuan untuk pembangunan.

"Fingsi dermaga yang pasti untuk aktivitas warga pesisir mahakam di Desa Tanjung Batu, termasuk dari arah Samarinda-Tenggarong ke arah hulu, saat ini masih terus aktif digunakan," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Istimewa)

Bantu Perekonomian Masyarakat, DPRD Kukar Dorong Sektor Swasta Siapkan Pasar Murah

TENGGARONG - Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2023, disambut antusias masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya Tenggarong dan sekitarnya. Bahkan apresiasi pun dilontarkan langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Yang turut hadir dalam pencahangan program se-Indonesia tersebut.

Ia menyampaikan, pada prinsipnya memang menyambut baik langkah pemerintah dalam menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat Kukar. Hal ini, sedikit banyak dapat membantu kondisi perekonomian masyarakat yang bisa dikatakan sulit saat ini.

"Hal-hal seperti ini harus bisa juga diinisiasi dengan pihak-pihak swasta yang lain. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini membantu ekonomi masyarakat kita," ucap Rasid, Senin (16/10/2023).

Bersamaan dengan GPM 2023, Pemkab Kukar pun kembali merilis Kredit Kukar Idaman (KKI). Yakni dengan menyasar petani, nelayan dan pembudidaya ikan. Setelah sebelumnya menyasar para pelaku Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh para petani dan nelayan kita," lanjutnya.

Ia berharap program KKI yang diluncurkan oleh Pemkab Kukar, berdampak besar dalam permodalan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar. Sehingga mereka tidak lagi harus terjerat dengan para rentenir, yang sangat merugikan dan mencekik para nelayan, pembudidaya ikan dan petani.

Namun, ia pun tetap berharap Pemkab bisa turut melakukan pengawasan dengan baik dan teliti kepada calon penerima. Sehingga pemanfaatannya bisa maksimal dirasakan, dengan harapan usaha para penerima bisa berkembang pesat. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi para petani dan nelayan mengembangkan pertanian mengembangkan usaha-usaha perikanan yang ada di Kukar," pungkas Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Suasana rilis Kredit Kukar Idaman yang menyasar petani, pembudidaya ikan dan nelayan. (Istimewa)

Rilis Kredit Kukar Idaman, Sasar Petani dan Nelayan

TENGGARONG - Sebagai upaya memudahkan pemodal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) merilis Kredit Kukar Idaman yang menyasar para petani, nelayan dan pembudidaya ikan. Dirilis bertepatan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) 2023, di Halaman Parkir Kantor Bupati Kukar, pada Senin (16/10/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebut ini terealisasi atas kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar dan Bankaltim-tara. Dan didukung langsung oleh Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim.

"Ini menjadi lanjutan program Pemkab Kukar. Yakni pemberian Kredit Kukar Idaman bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlebih dahulu diluncurkan pada 2021 silam," ujar Edi Damansyah.

Program Kredit Kukar Idaman yang menyasar petani, pembudidaya ikan dan nelayan ini dilakukan mengingat sektor pertanian dalam arti luas di Kukar cukuplah besar. Yakni hamparan pertanian di Kukar yang mampu memproduksi kebutuhan gabah kering

di Kaltim yang mencapai 42 persen. Sementara sektor perikanan menyentuh angka 80 persen dari kebutuhan Kaltim, berasal dari Kukar.

Edi pun berharap, cita-cita untuk memberikan penguatan akses permodalan bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan bisaxlebih mudah. Disamping menghindarkan mereka dari jeratan rentenir.

Dalam program Kredit Kukar Idaman, para petani, pembudidaya ikan dan nelayan akan diberikan maksimal pinjaman sebesar Rp 50 juta, dengan bunga 0 persen. Dengan waktu kredit yang diberikan mencapai 36 bulan. Pembayarannya pun bisa diatur, yakni salah satunya dengan pembayaran kredit yang menggunakan pola setiap panen atau tiap produksi dengan batas waktu jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

"Alokasi kredit ini dirancang oleh Pemkab Kukar dengan mengalokasikan penyertaan modal kepada Bankaltim-tara, untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan perekonomian daerah di sektor riil," tutup Edi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Wabup Kukar, Rendi Solihin saat meninjau salah satu lokasi pemasangan LPJU. (Istimewa)

Sepanjang 2023, Pemkab Kukar Pasang 2.450 Unit LPJU

TENGGARONG - Selama 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan 2.450 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) akan terpasang di 16 kecamatan yang kini belum mendapatkan penerangan. Bahkan pemasangan pun akan dikebut oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, sebelum 2023 berakhir.

Berdasarkan data yang terima, sejauh ini progres pemasangan LPJU di 16 titik kecamatan, sudah menyentuh angka 85 persen. Dan ini akan terus berjalan, sampai akhir 2023.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar pun menggelontorkan anggaran hingga Rp 5,9 miliar. Sudah terpasang di 7 titik, baik di hulu, tengah dan pesisir Kukar. "Progresnya positif ya, sekarang tinggal tiga lokasi lagi, dan diperkirakan pekan ini selesai," jelas Wakil

Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin.

Dalam pemasangannya, Dishub Kukar terus melakukan koordinasi dengan PLN, dalam hal pengadaan daya listrik, travo hingga surat kelayakan operasi. Pemasangan ini sendiri memakan waktu satu sampai dua hari.

Sebagaimana diketahui, pengadaan LPJU merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemkab Kukar ke masyarakat. Tak hanya untuk menerangi jalan saja, namun juga berkaitan dengan keselamatan pengendara, serta meminimalisir tindak kejahatan.

"Ini adalah bagian dari skema program Terang Kampungku. Untuk DPMD, mereka menangani penerangan di Desa. Disperkim menangani penerangan permukiman, dan untuk Dishub menangani penerangan jalan poros," tutup Rendi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



CAPAI 10.000 TRANSAKSI PER BULAN, BORNEO ONLINE STORE JADI MARKETPLACE LOKAL UNGGULAN KALTIM

BACA HALAMAN A2

Poliklinik Konservasi Gigi RSUD Tutup 3 Hari





Pada Februari 2021, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) telah menggelar soft launching marketplace Bontang Online Store (borneos.co) yang dikembangkan sebagai sarana jual beli dan promosi UMKM secara daring.

Capai 10.000 Transaksi per Bulan, Borneo Online Store jadi Marketplace Lokal Unggulan Kaltim

BONTANG-PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) yang merupakan produsen pupuk urea terbesar di Asia Tenggara, terus berkomitmen untuk mengembangkan perusahaan yang berkelanjutan, tidak hanya dari segi bisnis, namun juga dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek.

Salah satu upaya yang dibangun oleh Pupuk Kaltim dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat adalah melalui inisiasi marketplace lokal, yaitu Borneo Online Store (Borneos.co). Marketplace ini menjadi salah satu pilar ekonomi digital di Bontang, Kalimantan Timur, yang fokus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Borneo Online Store, yang mulai beroperasi pada tahun 2022, telah berhasil menjalin kerja sama dengan 399 mitra UMKM lokal. Ini adalah bukti nyata komitmen Pupuk Kaltim dalam mendukung pengembangan UMKM lokal dengan memberikan para pelaku usaha platform yang kuat untuk berjualan dan mempromosikan produk secara daring. Berkat sinergi ini, Borneo Online Store

telah mencatatkan lebih dari 10.000 transaksi per bulannya.

Marketplace Borneos.co sendiri merupakan hasil pengembangan dari program Bazar Online yang pertama kali digagas oleh Pupuk Kaltim. Program ini dicanangkan untuk membantu pelaku UMKM untuk dapat tetap beroperasi dan menghasilkan pendapatan saat pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas di masa pandemi Covid-19. Melihat kesuksesan program Bazar Online, Pupuk Kaltim melihat potensi lebih besar yang bisa dimanfaatkan, dan itulah awal mula lahirnya Borneo Online Store.

Sugeng Suedi, Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pupuk Kaltim, mengungkapkan, "Borneos.co lahir sebagai wadah bagi UMKM lokal di wilayah Bontang, Kalimantan Timur untuk dapat mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan potensi penjualan produk-produk lokal bagi para pelaku usaha. Kami melihat pentingnya memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin berwirausaha agar tetap produktif dan berpenghasilan. Alhamdulillah,

dengan capaian positif yang berhasil diraih hingga saat ini, kami berharap bisa terus mendukung pelaku UMKM untuk semakin go digital melalui layanan Borneos.co."

Borneos.co bukan hanya tentang menjalankan bisnis semata, namun juga memberikan layanan yang dapat mencerminkan komitmen Pupuk Kaltim dalam mendukung visi dan misi Kota Bontang untuk memajukan kapabilitas pelaku usaha lokal agar lebih unggul dan tangguh dalam memasuki ekonomi digital. Bontang, sebagai salah satu kota yang bersemangat untuk tumbuh dan berkembang, tentunya membutuhkan solusi seperti Borneos.co dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Salah satu faktor kesuksesan utama Borneo Online Store adalah keberagaman produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan lebih dari 3.000 produk unggulan dari berbagai kategori seperti makanan dan minuman, kerajinan dan kriya, retail, fesyen, kesehatan, agribisnis serta pariwisata. Marketplace ini telah menjadi destinasi utama bagi

Lanjutan Utama

masyarakat Bontang untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian.

Produk dengan kategori makanan dan minuman menjadi pilihan produk yang paling diminati oleh masyarakat Bontang ketika mengakses Borneos.co. Tidak hanya itu, Borneo Online Store juga berkolaborasi dengan para kurir lokal dengan tujuan agar dapat memastikan pengiriman produk yang cepat dan efisien kepada pelanggan sekaligus membuka peluang kerja dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal.

Tak hanya menawarkan platform bagi UMKM untuk bersaing di dunia digital, Borneos.co telah menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan secara aktif memberdayakan UMKM di Bontang. Kedepannya, Borneo Online Store ini diharapkan dapat berkembang lebih besar lagi dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas tidak hanya di kota Bontang, namun di kota lain baik di wilayah provinsi Kalimantan Timur maupun tingkat nasional.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, Borneos.co bukan hanya sebuah marketplace, melainkan sebuah kisah sukses kolaborasi antara masyarakat, sektor industri seperti Pupuk Kaltim bersama dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pupuk Kaltim telah membuktikan bahwa bisnis dapat berperan lebih dari sekadar mencari keuntungan, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan pencapaian transaksi yang terus meningkat, Borneos.co adalah bukti nyata bahwa ketika komitmen dan kolaborasi terjalin, impian memajukan ekonomi lokal dapat menjadi kenyataan.

"Borneo Online Store dan Pupuk Kaltim telah membuka jalan bagi UMKM di Bontang untuk meraih sukses dalam ekonomi digital, dan ini adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Semoga pencapaian ini akan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi lokal yang lebih tangguh dan inklusif," tutup Sugeng. (ADV)

Tampilan marketplace UMKM Bontang, yaitu Borneos.co yang tujuan awalnya dikembangkan dari program Bazar Online, yang digagas oleh Pupuk Kaltim untuk mewadahi para pelaku UMKM Bontang agar tetap produktif dan berpenghasilan di masa pandemi Covid-19.



SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Teguh Ismartono mengungkapkan kehadiran Borneos.co sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pengembangan UMKM lokal, agar ke depannya mampu menjangkau pasar dengan lebih luas sekaligus meningkatkan potensi penjualan dari produk yang dihasilkan.



Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Bontang.

(DWI S)

Poliklinik Konservasi Gigi RSUD Tutup 3 Hari

BONTANG – Poliklinik konservasi gigi RSUD Taman Husada menutup sementara pelayanannya selama 3 hari sejak tanggal 16-18 Oktober

2023. Manajemen RSUD mengumumkan akan kembali membuka pelayanan di tanggal 19 Oktober 2023. Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang

Pelayanan dan Penunjang Medik menjelaskan, poliklinik konservasi gigi ditutup sementara lantaran adanya dokter yang mengikuti pelatihan.

"Dokter spesialisnya sedang mengikuti pelatihan, sehingga tidak ada yang bisa membackup untuk menggantikan dokter tersebut, karena dokternya hanya ada satu," ungkapnya saat diwawancarai redaksi Radarbontang.com, Senin (16/10/2023).

Ratna juga menjelaskan, untuk setiap dokter memiliki perannya masing-masing. Dari dokter bedah mulut hingga dokter gigi anak, mereka tidak bisa digantikan, karena memiliki peran masing-masing.

"Untuk layanan konservasi gigi tidak bisa digantikan semisalnya dengan dokter gigi anak atau dengan bedah mulut, atau yang lainnya. Karena pastinya ilmu yang berbeda-beda, memiliki peran masing-masing, serta mempunyai keahliannya tersendiri," paparnya.

Selain karena dokter yang sedang ada kegiatan, alasan lainnya apabila poliklinik tutup disebabkan ada dokter yang sedang mengambil cuti. Mulai dari cuti tahunan, cuti dengan alasan yang sangat urgent, bahkan cuti sakit. Itu merupakan hak bagi seluruh karyawan tentunya. (adv/dwi)

PEMBERITAHUAN
BERIKUT DIINFORMASIKAN PELAYANAN KLINIK YANG TUTUP

KLINIK KONSERVASI GIGI
TUTUP

TANGGAL 16 - 18 OKTOBER 2023

BUKA KEMBALI PADA:
HARI KAMIS, 19 OKTOBER 2023

0815 456 00006 | Rsud Taman Husada | rsudbontang | rsud.bontangkota.go.id



Salah satu layanan pengaduan di RSUD Bontang menggunakan barcode. (Yahya Yabo)

RSUD Bontang Layani Pengaduan Melalui Scan Barcode

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang melayani pengaduan pelanggan atau pasien menggunakan scan QR code, yang disebar di seluruh lantai dan bisa diakses oleh seluruh pengunjung maupun pasien.

Humas RSUD Tamam Husada Bontang, dr Siti Aisyatur Ridha menjelaskan, scan QR code dimaksudkan untuk memberikan layanan pengaduan bagi pengunjung atau pasien mengenai pelayanan rumah sakit.

“Ada scan QR code yang disebar di rumah sakit dan bisa diisi oleh pelanggan mengenai survei kepuasan,” kata dr Ridha.

Dr Ridha mengatakan, ada tiga barcode seperti survei kepuasan, pengaduan pe-

langgan, dan informasi layanan.

“Apabila ada permasalahan di unit-unit kami bisa mengakses barcode di bagian pengaduan hingga informasi pelayanan. Ada tiga barcode disediakan di seluruh layanan rumah sakit,” sebutnya.

Dr Ridha juga mengatakan, selain penilaian pelayanan survei untuk rumah sakit, ada juga survei yang diberikan untuk pelayanan BPJS Kesehatan untuk mengetahui layanan.

“Ini juga dalam rangka meningkatkan mutu layanan rumah sakit, baik internal maupun eksternal yang dilaporkan dari pasien,” kata dr Ridha. (adv/yah)



dr Muhammad Rasyid Ridho, Sp.PA saat menunjukkan alat-alat di laboratorium PA. (Yahya Yabo)

Satu-satunya di Bontang, Laboratorium Patologi Anatomi Milik RSUD Taman Husada

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang memiliki Laboratorium Patologi Anatomi (PA) yang dikhususkan memeriksa sampel FNAB, untuk memeriksa anatomi tubuh manusia termasuk sel-sel bagi penyakit di dalam tubuh.

dr Muhammad Rasyid Ridho, Sp.PA, Dokter Spesialis Patologi Anatomi mengatakan, laboratorium PA untuk memeriksa golden standar atau diagnosis tertentu yang diperiksa menggunakan mikroskop.

“Cara kerja di laboratorium patologi anatomi memeriksa sel-sel tubuh untuk memastikan diagnosis pemeriksaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan di laboratorium PA menggunakan mikroskop dengan memeriksa kembali penegakan diagnosis.

“Laboratorium PA tujuannya sendiri untuk memastikan penyakit. Umumnya ada seperti itu. Ada juga yang tidak menggunakan PA,” katanya.

Laboratorium PA beroperasi secara resmi pada awal tahun 2023, namun telah ada sejak tahun 2022 dengan dua dokter spesialis dan satu analisis.

“Ada dua dokter spesialis patologi anatomi dan satu analisis di laboratorium,” katanya.

Selanjutnya, dr Rasyid menambahkan, ia sendiri telah bertugas sejak tahun 2014 di RSUD Bontang dan mengambil spesialis patologi anatomi pada 2022.

“Ini lab satu-satunya di Bontang,” ungkapnya. (adv/yah)



Manajemen RSUD Taman Husada Bontang saat berkunjung ke RS Makassar. (ist)

Hadapi Keluhan Pelanggan, RSUD Taman Husada Ikuti Pelatihan Handling Customer di RSUD Makassar

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang berkunjung ke RSUD di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Kunjungan itu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan komunikasi efektif handling keluhan customer.

Dalam kunjungan tersebut, dilaksanakan pelatihan menggunakan metode in-class learning dan out-ing-class learning dengan diikuti sebanyak 40 orang peserta.

Kabag Hukum, Humas, dan Kerja sama RSUD Taman Husada Kota Bon-

tang, Syariful Rahman mengatakan, kegiatan dalam bentuk out-ing-class learning atau studi lapangan ditujukan untuk mempelajari dan berbagi pengalaman.

"Kami belajar dari praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah dicapai sebuah institusi," jelasnya.

Syariful Rahman menambahkan, kegiatan ini telah lama ingin dilakukan namun baru pada tahun ini dapat direalisasikan.

"Kami membawa perwakilan berb-

agai unit dari rumah sakit, guna mendapatkan hal baru yang nantinya bisa diaplikasikan di Bontang. RSUD kami juga baru saja melakukan rekredensial untuk perpanjangan kerja sama dengan BPJS. Semoga pelatihan ini bermanfaat," pungkasnya.

Ia mengharapkan dengan kunjungan ini dapat melihat dan mencontoh bagaimana penerapan komunikasi efektif handling keluhan bagi pelanggan (customer). (adv/yah)



FGD yang digelar DPMPTSP beberapa waktu lalu. (ist)

DPMPTSP Rutin Upgrade Standar Pelayanan

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD), Kamis (12/10/23). Kegiatan ini membahas standar pelayanan DPMPTSP Penyusunan Kajian Pelayanan Standar Perizinan

Sub Koordinator Bidang Ekonomi DPMPTSP Kota Bontang, Natalia Santi Kanan menjelaskan, bahwa sebuah unit layanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar ini merupakan tolak ukur penyelenggaraan bagi pelaksana dan pengguna layanan.

"Komponen ini nantinya menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan, dan menakar kepuasan penggunaan layanan saat mengak-

ses layanan di unit pelayanan publik," katanya.

Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pengguna layanan dan kemajuan pengetahuan, informasi, dan komunikasi. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya.

Adapun tujuan pelaksanaan penyusunan kajian standar pelayanan ini adalah menyusun standar pelayanan perizinan dengan baik dan konsisten, sesuai dengan peraturan yang berlaku, menetapkan standar pelayanan perizinan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan baik

penyelenggaraan maupun penggunaan layanan DPMPTSP, dan menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP.

"Tiap tahun kita memang selalu upgrade, dan tahun ini ada perizinan yang ditarik ke sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Jadi ada layanan yang untuk daerah dan ada layanan yang ditangani oleh daerah," jelasnya.

Oleh sebab itu, sebelum disahkan oleh Kepala DPMPTSP maka dilakukan FGD terkait hasil rapat dan bekerjasama dengan Universitas Mulawarman untuk rapat akhirnya, sehingga dari 85 ketentuan standar pelayanan turun menjadi 51 saja. (sya/adv)



Kunjungan DPMPTSP ke salah satu usaha di Bontang. (ist)

DPMPTSP Rutin Lakukan Pengawasan Usaha

BONTANG - Salah satu tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau pelaku usaha, baik yang telah maupun belum memiliki izin.

Hal ini sesuai dengan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peran pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis resiko, sangat diperlukan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan di atas.

Saat ini DPMPTSP Kota Bontang mengawasi sekitar 40 unit usaha.

Isma Istihari, Japfung Penata Perizinan DPMPTSP Kota Bontang menjelaskan, indikator pengawasan yakni, tata ruang dan standar bangunan gedung, standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, standar pelaksanaan kegiatan usaha, persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pema-

faatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

"Jadi hal-hal yang kami awasi itu mengenai jenis-jenis izinnya. Seperti apakah izin dan usaha yang dilakukan itu sama. Semisal dia izinnya konstruksi ternyata yang dijalani itu usaha ikan," katanya.

Pengawasan juga dilakukan untuk melihat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), perusahaan yang sudah memiliki izin diwajibkan untuk membuat LKPM. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya LKPM adalah untuk meningkatkan realisasi investasi Kota Bontang.

Bila pada saat pengawasan perusahaan atau pelaku usaha terbukti tidak membuat laporan kegiatan, maka perusahaan tersebut akan dijatuhi sanksi.

Adanya pengawasan juga ditujukan untuk melihat perkembangan dari perusahaan yang ada. Seperti, apakah perusahaan tersebut mengalami kendala dalam usahanya, atau apakah ada masalah dalam usaha maupun dalam pembuatan LKPM-nya.

Pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan

kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha dan rujukan pembinaan atau penenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Sebanyak 40 tempat usaha, yang terbagi menjadi:

10 Tempat Usaha Berbasis Resiko Tinggi, Perwakilan: Apotik

10 Tempat Usaha Berbasis Resiko Menengah Tinggi: DAM

10 Tempat Usaha Berbasis Resiko Menengah Rendah: Toko Sembako, Toko Plastik, Toko Penjual Pakaian/Boutiq

10 Tempat Usaha Berbasis Resiko Rendah: Lapak Penjual Tahu Tempe, Lapak Sayur Mayur, Lapak Jajanan Pasar.

"Berdasarkan pengawasan ada pelaku usaha yang belum memiliki NIB, belum memperpanjang, dan ada juga yang hilang," tutupnya. (adv/sya)



PEMKAB BERAU HARUS ANALISIS TUJUAN KENAIKAN DAN PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT



**PEREMPUAN HARUS IKUT
BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN**



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

PEMKAB BERAU HARUS ANALISIS TUJUAN KENAIKAN DAN PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memahami sumber dan tujuan kenaikan dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dia menjelaskan, kenaikan signifikan dalam pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, adalah berita baik bagi Kabupaten Berau. Hal tersebut menunjukkan potensi tambahan alokasi dari pemerintah pusat dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

"Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu perlu dilakukan analisis karena hal ini dapat membantu dalam pengoptimalan alokasi anggaran dan memastikan penggunaan dana yang efektif serta transparan," ucapnya.

Pendapatan Transfer antar daerah yang meningkat, juga mengindikasikan hubungan

kerjasama yang semakin erat antara Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Komponen seperti dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil seharusnya digunakan untuk mendukung proyek-proyek kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Penggunaan dana yang akuntabel dan transparan, adalah kunci untuk memastikan manfaat maksimal dari pendapatan transfer ini. Kabupaten Berau dapat memanfaatkan kenaikan ini untuk merencanakan proyek-proyek jangka panjang, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, infrastruktur, pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya," tambahnya.

Secara keseluruhan, kenaikan pendapatan transfer adalah peluang positif bagi Kabupaten Berau, tetapi pengelolaan yang bijaksana perlu diutamakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan kata lain, dana ini harus dialokasikan dengan bijaksana, untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

PEREMPUAN HARUS IKUT BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN

TANJUNG REDEB - Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan kebijakan pusat yang dinilai akan menghasilkan program-program terkait perencanaan pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menuturkan, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam melakukan program pembangunan.

Disebutnya, dengan adanya Pengarusutamaan Gender, Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan merupakan harapan bahwa perempuan bisa berperan dimana-mana. Khususnya dalam pembangunan, baik itu di tingkat kabupaten maupun nasional.

“Yang harusnya ini menjadi peran laki-laki, perempuan juga bisa masuk berperan dalam berkontribusi membangun Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dilihat dari lembaga eksekutif, sudah banyak perempuan yang menjadi kepala dinas dan Bupati Berau.

“Saya sendiri sudah pernah merasakan menjadi Ketua DPRD Berau dalam artian di Kabupaten Berau ini sudah dibuka ruang seluas-luasnya untuk perempuan mengaktualisasikan dirinya,” tuturnya.

Sebagai perempuan, ia melihat ketika diberi kesempatan dapat menunjukkan kemam-

puannya. “Itu yang saya bilang, perempuan saat ini sudah memiliki peran penting,” katanya.

Dirinya melanjutkan, peran perempuan yang dahulu hanya dicap penghuni dapur, kini harus mampu membuktikan, bahwa perempuan juga bisa bergerak namun tidak melupakan kodratnya menjadi seorang ibu.

Elita juga berpesan kepada seluruh perempuan, jangan pernah takut untuk bertindak untuk suatu kemajuan, dan tidak selalu bersembunyi di balik punggung lelaki.

“Benar, jangan takut tapi jangan melupakan kodratnya,” tutupnya. **(adv/set)**



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno.

MINTA ANGGARAN TAMBAHAN UNTUK PENDIDIKAN

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno menyoroti permasalahan anggaran di bidang pendidikan, terutama untuk pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB).

Menurutnya, anggaran pembangunan RKB untuk SD dan SMP di Berau jauh di bawah jumlah ideal yang dibutuhkan sejumlah Rp 20 miliar. Padahal, anggaran untuk pendidikan lebih dari cukup.

Karena itu, Suharno meminta Pemkab Berau untuk menambah jumlah anggaran untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Sebab, anggaran RKB untuk SMP yang disiapkan sejumlah Rp 7 miliar. Sedangkan untuk SD hanya Rp 2,2 miliar.

"UU itu mewajibkan bahwa anggaran di dinas itu 20 persen. Itu sebetulnya tidak bisa ditawar-tawar apapun alasannya. Saya sangat tidak setuju kalau dikatakan anggaran itu

kurang karena terpecah juga ke OPD lain," tegasnya.

Anggaran 20 persen itu, lanjutnya, seharusnya masuk semuanya ke Dinas Pendidikan (Disdik) Berau. Jika hari ini tidak terjadi seperti itu maka akan sukar bagi pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan di Berau.

"Bagaimana dunia pendidikan bisa maju, kalau di bidang infrastruktur saja tidak diperhatikan," terangnya.

Berhadapan dengan permasalahan itu, Suharno mengusulkan agar dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2024 mendatang, anggaran 20 persen itu wajib disusun Banggar DPRD. Anggaran itu juga wajib hukumnya untuk diserap 100 persen.

"Sekali lagi itu perintah UU. Maka harus diprioritaskan untuk pendidikan itu," tandasnya. (adv/set)



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

DORONG DISKAN KONTROL PRODUKSI IKAN DI TPI TANJUNG BATU

TANJUNG REDEB - Kampung Tanjung Batu akan memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka dari itu Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendorong Dinas Perikanan (Diskan) untuk mengontrol produksi ikan di sana.

Dia mengungkapkan, pembangunan TPI tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan.

"Sehingga dengan adanya TPI tersebut, pendaratan ikan sudah terfokus di satu tempat saja," ungkapnya.

Dibeberkannya, produktivitas ikan di Tanjung Batu tidak terkontrol dengan baik. Pasalnya, para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya ke pengepul.

"Tentu jika terus dibiarkan, dari segi Pendapa-

tan Asli Daerah (PAD) tidak menguntungkan," tuturnya.

Saga menerangkan, selama ini para pengepul memiliki pos-pos tersendiri. Hal itu, menurutnya membuat Diskan Berau sulit dalam mengontrol produksi ikan.

"Karena para nelayan tidak lapor hasil produksinya, melainkan langsung menjualnya ke pengepul," jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Diskan Berau harus membuat inovasi untuk mengontrol hasil produksi nelayan di perairan Pulau Derawan dan sekitarnya.

"Karena TPI ini berkontribusi meningkatkan PAD, selain itu juga nelayan terbantu karena hasil tangkap mereka langsung dipasarkan secara luas," pungkasnya. (adv/set)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

PEMBANGUNAN HARUS BERORIENTASI KEPADA HASIL, BUKAN TARGET

TANJUNG REDEB - Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menganggap banyak kegiatan pembangunan yang hanya berorientasi pada target penyelesaian, bukan hasil.

Dia membeberkan, banyak kegiatan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada selesainya pekerjaan tersebut, namun tidak pada hasil.

"Seperti pariwisata, sampai saat ini pariwisata banyak dijadikan alasan suatu pekerjaan yaitu untuk mendukung sektor pariwisata. Tetapi data menunjukkan bahwa sektor ini jalan ditempat karena sangat kecil dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Berau secara umum yang dapat dilihat dari PDRB," jelasnya.

Kemudian jalan usaha tani, banyak jalan

dibuat dengan nama Jalan Usaha Tani tetapi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat tidak meningkat. Ada juga irigasi, dimana banyak jaringan irigasi dibuat tetapi hasilnya tidak ada.

"Konstruksi dalam pelaksanaan (KDP) yang mangkrak seperti jalan Bandara Mantaritip Segmenandara – S. Kelay dan S. Kelay – Mantaritip akibat tidak adanya jembatan. Inti dari semua itu adalah salahnya penempatan modal atau aset pemerintah, akibat tidak adanya perencanaan secara komperensif dan holistik," tambahnya.

Hal ini akan semakin tidak jelas jika bukan hanya bicara sampai outcome yang merupakan dampak jangka pendek tetapi pada impact yang merupakan dampak jangka panjang. (adv/set)



**PERTALITE TETAP TERSEDIA,
PERTAMINA PASTIKAN DISTRIBUSI
KE SPBU BERJALAN SEPERTI BIASA**



**POLDA KALTIM MUSNAHKAN
SABU DAN PIL EKSTASI**



Sebuah truk BBM Peralite saat tengah mengisi BBM ke salah satu SPBU di Kota Balikpapan.

PERTALITE TETAP TERSEDIA, PERTAMINA PASTIKAN DISTRIBUSI KE SPBU BERJALAN SEPERTI BIASA

BALIKPAPAN – Sebagai bentuk penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014, PT Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan tetap menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke setiap SPBU yang menyalurkan BBM jenis tersebut. Hal ini diungkapkan Area Manager Communication, Relations dan CSR Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, dalam keterangannya pada Senin (16/10/2023).

“Untuk Kota Balikpapan, misalnya, setiap hari kami menyalurkan rata-rata sebanyak 350 Kiloliter (KL) BBM jenis Peralite. Jumlah tersebut tetap sama semenjak 3 bulan terakhir terhitung dari Agustus hingga Oktober ini. Artinya, penyaluran BBM jenis Peralite tetap berjalan seperti biasa dalam 3 bulan terakhir. Bahkan untuk

stok BBM itu sendiri di Integrated Terminal (IT) Balikpapan masih tersedia hingga akumulatif 9-14 hari ke depan,” ujarnya.

Menanggapi maraknya isu penghapusan Peralite di lapangan, Arya menjelaskan bahwa tidak ada rencana penghapusan dalam waktu dekat. “Yang diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina beberapa waktu lalu adalah rencana penambahan bahan bakar nabati, yaitu Ethanol ke produk Peralite menjadi bahan bakar yang lebih baik. Tentu terkait penamaan dan harga masih dalam tahap kajian. Tidak ada perubahan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Sementara itu, banyaknya masyarakat yang mengeluhkan antrian BBM jenis Peralite di sejumlah SPBU, Arya menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. “Faktor yang pertama adalah adanya panic buying

karena kekhawatiran terhadap isu penghapusan Peralite. Dalam hal ini, sekali lagi kami menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan BBM jenis Peralite. Yang kedua, ada beberapa konsumen Pertamax yang beralih ke Peralite karena faktor kenaikan harga di bulan Oktober 2023. Faktor kedua ini yang kami harapkan kesadaran dari konsumen BBM dengan spesifikasi kendaraan minimal RON 92 untuk tetap menggunakan BBM jenis Pertamax sehingga kualitas kendaraan tetap terjaga,” tambah Arya.

PT Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap terpenuhi. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam pendistribusian energi ke seluruh negeri. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus Susanto



Pasar Murah yang Diadakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Selama 3 Hari di Halaman Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan

PERINGATI HARI PANGAN SEDUNIA, PEMKOT BALIKPAPAN GELAR PASAR MURAH SELAMA 3 HARI

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) bersama Kecamatan Balikpapan Selatan menggelar pasar murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2023 pada Senin (16/10/2023).

Camat Balikpapan Selatan, Muhammad Hakim, mengatakan bahwa Pasar Murah yang diselenggarakan di halaman kantor Kecamatan Balikpapan Selatan akan berlangsung selama 3 hari ke depan, melibatkan 30 pedagang binaan DP3 Kota Balikpapan.

"I ada 30 stan yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sayur, daging, ayam potong, hingga beras lokal," ujarnya.

Lebih lanjut, Hakim menjelaskan bahwa pemerintah juga menggandeng Bulog dalam menyediakan beras, gula, dan minyak makan. Hal ini dilakukan untuk menekan harga kebutuhan sehari-hari.

"Selain memperingati Hari Pangan Se-

dunia, kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan inflasi karena beberapa kebutuhan di pasar masih memiliki harga yang tinggi," jelasnya.

Pemilihan lokasi di halaman kantor Kecamatan Balikpapan Selatan juga merupakan langkah untuk mencapai masyarakat secara lebih merata. "Lokasinya sangat strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk, perumahan, dan kantor. Sehingga bisa dijangkau oleh siapapun," tambah Hakim.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan Pasar Murah yang berlangsung selama 3 hari ini untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

"Yang pasti, di Pasar Murah ini, barang-barang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di pasar konvensional. Jadi, mari dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Balikpapan," tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Proses Pemusnahan Barang Bukti Sabu dan Pil Ekstasi

POLDA KALTIM MUSNAHKAN SABU DAN PIL EKSTASI

BALIKPAPAN - Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Kaltim melakukan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan dari dua pelaku berinisial AR (26) dan RI (27) yang ditangkap di Kota Samarinda pada akhir September dan awal Oktober 2023 lalu.

Pamin Binops Ditresnarkoba Polda Kaltim, Iptu Wariston Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus ini lebih dulu menangkap tersangka AR di Kecamatan Samarinda Kota dengan barang bukti sabu sebanyak 90,06 gram.

"Tersangka ditangkap akhir September di Kecamatan Samarinda Kota dan saat digeledah ditemukan barang bukti 2 poket sabu masing-masing sebanyak 50,32 gram dan 47,74 gram," ujarnya Senin (16/10/2023).

Lebih lanjut, Wariston menjelaskan, untuk tersangka kedua, RI ditangkap

di Kecamatan Samarinda Ulu pada awal Oktober 2023 lalu. "Pengungkapan kasus kedua dengan tersangka RI, barang buktinya berupa 20 butir pil ekstasi," jelasnya.

Setelah dinyatakan berkas dan pemeriksaan lengkap, polisi pun melakukan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan keduanya, yakni sabu dan pil ekstasi diblender dan ditumpahkan ke dalam kloset.

"Namun ada yang kita sisihkan untuk keperluan barang bukti di persidangan. Untuk sabu 0,5 gram dan pil ekstasi 2 butir," tambahnya.

Setelah proses pemusnahan barang bukti ini, tersangka dan berkas akan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan untuk segera dilakukan persidangan. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SELASA
17 OKT 2023



BUPATI PASER SAMPAIKAN RANCANGAN NOTA KEUANGAN UNTUK 2024

**SEDERET PERTANYAAN FRAKSI-FRAKSI
KE PEMKAB PASER TANGGAPI NOTA
KEUANGAN 2024**





Bupati Paser, Fahmi Fadli saat menyampaikan nota keuangan

BUPATI PASER SAMPAIKAN RANCANGAN NOTA KEUANGAN UNTUK 2024

PASER - Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dibacakan Bupati Paser, Fahmi Fadli melalui rapat paripurna dihadapan DPRD Kabupaten Paser, Senin (16/10/2023).

Dijelaskan Fahmi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser di 2024 diperkirakan turun 1-2 persen dari tahun 2022 mencapai 1,09 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,00 poin, naik 0,56 dari 2022 yang mencapai 73,44.

"Untuk tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 9,00 persen, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022 mencapai 9,43 persen," kata Fahmi dalam pidatonya.

Kemudian pada tingkat pengangguran terbuka ditargetkan mencapai 3,94 persen 2024 yang mengalami penurunan dibanding 2022 diangka 4,88 persen. Adapun di 2024 total pendapatan yang direncanakan mencapai Rp 3,9 triliun lebih.

"Rencana pendapatan tersebut meliputi beberapa bagian, meliputi PAD senilai Rp 197,86 miliar, pendapatan transfer Rp 3,1 triliun lebih dan pendapatan daerah yang sah senilai Rp 800 juta," paparnya.

Diterangkannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 197,86 miliar lebih berasal dari pajak daerah senilai Rp 36 miliar lebih. Retribusi daerah Rp 10 miliar dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan Rp 6 miliar lebih

dan PAD yang sah Rp 144 miliar lebih.

Pada pendapatan dari dana transfer direncanakan senilai Rp 3,1 triliun lebih. Rinciannya bersumber dari dana perimbangan, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp 2,7 triliun dan pendapatan transfer antar daerah senilai Rp 373 miliar.

"Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 800 juta, semuanya berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ulasnya.

Berdasarkan uraian pendapatan dan penerimaan, kata Fahmi maka kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk membiayai belanja pada anggaran 2024 senilai Rp 3,9 triliun lebih.

Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai belanja operasi senilai Rp 2,04 triliun lebih, belanja modal senilai Rp 1,4 triliun lebih dan belanja tidak terduga senilai Rp 10 miliar serta belanja transfer Rp 393 miliar lebih.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah direncanakan senilai Rp 585 miliar, yang merupakan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya yang diperkirakan senilai Rp600 miliar dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah senilai Rp15 miliar.

Sementara pada 2024, kata Fahmi akan ada agenda penting nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara serentak dilak-

sanakan. Ia menilai kedua agenda besar tersebut akan berpengaruh secara ekonomi dan sosial di Kabupaten Paser.

"Konstelasi politik ini memerlukan pencermatan yang mendalam untuk menentukan skala prioritas kebijakan dan pembiayaan, serta penggunaan dana APBD," terangnya.

Fahmi berharap, semua pihak terkait, agar dalam penentuan alokasi anggaran dan skala prioritas agar bisa benar-benar melakukan penyesuaian dengan isu nasional, baik yang kecil maupun besar membawa dampak terhadap Kabupaten Paser.

Agenda lain yang akan dihadapi pada tahun 2024, rencana Pemerintah Pusat untuk pemindahan jajarannya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sehingga, sebagai penyangga, Kabupaten Paser diminta untuk segera melakukan penyesuaian.

"Kita sebagai salah satu kabupaten penyangga dan mitra strategis IKN, akan tetap melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk yang terkait dengan belanja yang akan memperkuat posisi Paser sebagai kabupaten penyangga," tandas Bupati Paser.

Fahmi juga mengharapkan agar Banggar DPRD Kabupaten Paser dan TAPD Paser, agar segera mengagendakan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Paser tahun anggaran 2024 menjadi Perda dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (bs)



Rapat paripurna di Gedung Baling Seleloi

SEDERET PERTANYAAN FRAKSI-FRAKSI KE PEMKAB PASER TANGGAPI NOTA KEUANGAN 2024

PASER - Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan pandangan umumnya terhadap Note Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Paser tentang APBD Kabupaten Paser 2024.

Penyampaian tersebut dilakukan sesuai Bupati Paser, Fahmi Fadli, membacakan pidatonya dihadapan Anggota DPRD Kabupaten Paser melalui rapat paripurna di Gedung Baling Seleloi, Senin (16/10/2023).

Dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Paser, Indra Pardian menyampaikan, setelah membaca dan mencermati penyampaian tentang Nota Keuangan Raperda APBD, ada beberapa yang menjadi catatan penting.

"Penyusunan APBD Tahun 2024 harus sejalan dengan upaya Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur

yang berkualitas, segala aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang engacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, guna mendorong penguatan ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat dan komunitas, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser harus memberi ruang tumbuhnya inovasi dari berbagai sektor produktif.

"Serta memprioritaskan program-program yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat, terutama pendidikan dan kualitas layanan kesehatan," tambahnya.

Fraksi PKB Paser juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Paser yang telah menyelesaikan tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk 2024 sesuai batasan waktu yang telah ditentukan oleh regulasi.

Terlebih, rencana APBD Ka-

bupaten Paser pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp3,9 triliun lebih. "Kami berharap agar besarnya anggaran itu dapat menyelesaikan target pembangunan daerah, khususnya target yang belum tuntas," harapnya.

Mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan berdampak pada daerah sekitar, utamanya Kabupaten Paser. Pihaknya menegaskan agar nantinya turut berperan serta dalam percepatan pembangunan yang mencakup semua aspek pembangunan.

"Mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, transportasi, SDM dan permintaan hasil pertanian dan peternakan," tandas Indra.

Selain itu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemkab Paser menyiapkan strategi dalam bentuk program di 2024, guna menangkap berbagai peluang sebagai mitra strategis IKN Nusantara.

Lanjutan Sederet

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Paser, yang diwakili Lamaludin mengatakan, pada prinsipnya pihaknya dapat memahami struktur RAPBD 2024 yang di fokuskan untuk mengatasi kesenjangan atau disparitas pembangunan.

"Hal itu dapat terlihat dari postur rancangan APBD 2024 melalui besaran belanja modal untuk jalan dan jembatan senilai Rp1 triliun lebih, dan belanja modal gedung bangunan senilai Rp 254 miliar lebih," terangnya.

Fraksi Demokrat Paser berpendapat, besaran anggaran untuk belanja modal tersebut benar-benar dapat memberikan efek positif kepada masyarakat Kabupaten Paser terutama untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan antar desa dan kota.

Hanya saja, Fraksi Demokrat ingin mendapatkan penjelasan terkait besaran kerangka anggaran belanja modal tersebut terutama pada belanja modal jalan dan jembatan. Selain itu, belanja modal gedung dan bangunan, yang dilihat dari segi kajian teknis dan ilmiah.

"Apakah ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan karena tahun ini pada laporan realisasi semester pertama pada sub kegiatan belanja modal ini masih sangat rendah," singgungnya.

Pihaknya memintasi kepastian dari Pemkab Paser, agar kondisi seperti itu tidak akan terulang kembali di 2024. Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Paser, Sutarno mengatakan, ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan karena APBD 2024.

"Dari nota keuangan yang Bupati Paser sampaikan, kami mencatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024

mengalami perubahan dari 1-1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1-2 persen untuk tahun 2024," terangnya.

Sementara di sisi lain, Fraksi Golkar mendapatkan data bahwa tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,88 persen tahun 2022, tahun ini menjadi 4,5 persen, dan proyeksi tahun 2024 mencapai 3,9 persen.

Pihaknya mempertanyakan strategi dari Pemkab Paser, dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemda Paser.

"Apalagi diperhadapkan dengan situasi ekonomi global yang kurang kondusif saat ini, khususnya sektor pertambangan dan penggalian," ungkapnya.

Selain itu, Fraksi Golkar mencermati target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser yang mengalami perubahan. Mulanya di angka 9,43 persen tahun 2022, tahun ini di angka 8,8 persen dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 9 persen.

"Meningkatnya target tersebut, membuat Fraksi Golkar ingin mengetahui alasan dari Pemkab Paser yang menaikkan angka tingkat kemiskinan di tahun 2024," katanya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Paser, Yairus Pawe, menyinggung proyeksi pajak daerah senilai Rp36 miliar lebih. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding proyeksi pajak daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp97 miliar lebih.

"Kami mempertanyakan mengapa proyeksi pajak daerah tersebut mengalami penurunan," sebutnya.

Selain itu proyeksi retribusi daerah pada APBD 2024, juga tidak mengalami perubahan sig-

nifikan dibandingkan dengan proyeksi retribusi daerah pada perubahan APBD Perubahan tahun 2023. Hal itu turut dipertanyakan.

"Kami mempertanyakan upaya dari Pemda Paser dalam meningkatkan capaian kinerja retribusi daerah, dan bagaimana implementasi dari Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disahkan," singgungnya.

Sementara Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Paser Aji Jarnawi, menyinggung soal SILPA yang diproyeksikan pada Raperda APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp600 miliar. Angka itu dinilai mengalami penurunan dibandingkan angka SILPA 2023 senilai Rp 966 miliar lebih.

"Pada IPM tahun 2024 di angka 74 persen, kami menanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menaikkan IPM khususnya target di bidang pendidikan yakni proyeksi angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah," tandasnya.

Dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Paser, Sri Nordianti, mempertanyakan terkait pertimbangan Pemkab Paser dalam memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser.

"Kami menginginkan penjelasan dari Pemkab Paser terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi Paser tahun 2024 di angka 1 sampai 2 persen dari capaian tahun 2022 di angka 1,09 persen," ungkapnya.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menginginkan penjelasan mengenai belanja modal. "Kami ingin ada penjelasan soal belanja modal tanah senilai Rp 24 miliar lebih dan belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp 254 miliar lebih," tandasnya. (bs)